

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA'
HANABILLAH TENTANG IDDAH WANITA HAMIL
AKIBAT ZINA**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Ujian Komprehensif



Oleh:

AHMAD ZAINUDDIN
21033214

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2008**

Dra. Hj. Mujibatun M.Ag
Jl. Tanjung Sari No. 31 tambak Aji Ngaliyan Semarang.
Rupi'i M.Ag
Perum Griya Lestari B 2 No.2 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 4 (empat) eks.	Kepada Yth.
Hal	: Naskah Skripsi	Dekan Fak. Syari'ah
	A.n. <u>Sdr. Ahmad Zainudin</u>	IAIN Walisongo Semarang
		Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zainudin
Nomor Induk : 2103214
Jurusan : Akhwal al Syakhsyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT
ULAMA' HANABILLAH TENTANG IDDAH
WANITA HAMIL AKIBAT ZINA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Semarang,.....Juli, 2008

Pembimbing II,

Dra. Hj. Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zainudin.

Nim : 2103214.

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyah.

Judul skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA’
HANABILLAH TENTANG IDDAH WANITA HAMIL
AKIBAT ZINA.**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) tahun
akademik 2007/2008 guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari’ah.

Semarang, 21 Juli 2008

Ketua Sidang,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Penguji I,

Drs. H. A. Ghozali
NIP. 150 261 992

Pembimbing I,

Dra. Hj. Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Penguji II,

H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 276 114

Pembimbing II,

Rupi’i, M.Ag
NIP. 150 285 611

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

ABSTRAK

Iddah merupakan salah satu ketentuan agama yang memiliki dasar hukum yang jelas, setiap ketentuan agama tentu memiliki tujuan dan hikmah, diantara tujuan dan hikmahnya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, memberi kesempatan suami-isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik, menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang, kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami-isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Secara garis besar terdapat dua macam *iddah*: *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian. Para ulama' madzhab sepakat terhadap *iddah* wanita yang hamil karena akad, baik akad yang sah, *fasid* maupun persetubuhan *syubhat*, namun mereka berbeda pendapat tentang wanita yang hamil akibat zina. Menurut ulama' Hanabillah terdapat *iddah* bagi wanita yang hamil karena zina.

Persoalan yang muncul dan menarik dari latar belakang di atas akhirnya penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ulama' Hanabillah Tentang *Iddah* Wanita Yang Hamil Akibat Zina” penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita yang hamil akibat zina. 2) Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath ulama' Hanabillah terhadap pendapatnya tentang “*iddah* wanita yang hamil akibat zina”.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian dalam memperoleh data yang diperlukan menggunakan cara sebagai berikut : Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data-data tertulis. Kemudian setelah data terkumpul dianalisis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil akibat zina ada yang mengatakan wajib *iddah* dengan alasan rahimnya sudah berfungsi dan ada juga yang mengatakan tidak wajib *iddah* dengan alasan tidak ada kepemilikan antara laki-laki dan perempuan yang berzina karena tidak ada akad nikah.

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S al-Isra’ ayat 32).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan buat.

- Bapak (Sumali) dan Ibu (Sofiyah) tercinta yang tanpa lelah memberikan segala hasil keringatnya, do'anya, motivasinya sehingga penulis mengerti akan sebuah kehidupan dan mengerti akan sebuah prinsip yang perlu ditanamkan dalam kehidupan penulis.
- Mba' Nist beserta suami K.H. Munif Zuhri, Mas Imam beserta Isteri Mba' Istighfaroh, Mba' Muk beserta suami Mas Hasan dan Dek Zulaikhah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah menuju jenjang S1.
- Bapak Basyir (alm) Ibu Zubaidah sekeluarga yang telah banyak memberikan arahan2, wejangan2 kepada penulis ketika penulis berada dikos,.matur suwun Bapak Basyir (alm) penulis tidak akan pernah melupakan kebaikan2 yang pernah Bapak berikan, penulis hanya bisa mendo'a kan semoga bapak tenang di alam sana dan diampuni segala dosa2nya.....Amien.
- Keluarga Bapak Suyoto & Mama,.makasih yaaa buat masakannya.
- Keluarga Mas Yudy & Mb Dian, Jagoan Kecilku Zakky, Si Imut Mita..makasih banget tuk semuanya.
- The best friend kost **HAWELL** (Hanif yang ngaku kaya' **Torres (fitnah)**, Ni'am Bagor, Udin Tempe, Afif, Choerudin, Tomo yang ngaku juga kaya' **Hargreifes (fitnah juga)** Wahap, Edy N, Lukman eks, Toha eks, Yanto eks,

Eko, Samuel, Nyongkers, yang banyak memberikan hitam-putih kehidupan.....tetep kompak and tetep nonton bola bareng2..bravo Che_Ballack 13.

- Best Friend kost Pak RWMb Fidah, Cicie, Zulfa, Lenny eks, Pretty. Thank buat kalian semua yang telah banyak mengisi hari2 semasa kuliah & membantu dalam menyelesaikan skripsi.
- Thanks banget buat Eva Fariya yang selalu memberi semangat dalam menemukan sebuah Iman dalam kehidupan penulis.
- Temen-Temen AS_C angkatan 2003, thanks buat x an semua & kompak selalu.
- Especially buat **Dhany Yunita**, yang selalu menemani hari-hari penulis ketika dalam senang maupun susah & selalu sabar dalam menempuh perjuangan hidup..

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Studi analisis pandangan imam hanbali tentang iddah wanita hamil akibat zina” dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.

Shalawat dan salam, semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa panji-panji Islami, beserta keluarga keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya hyang selalu membawa dan mengembangkan panji Islamnya hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA, selaku rector IAIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Drs. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Yth. Ibu Mujibatun selaku pembimbing I dan Bapak Rupi’I selaku pembimbing II, yang sabar menanti penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan tiada henti-hentinya selalu mengingatkan penulis.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Yth. Bapak (Sumali) Ibu (Sofiyah) tercinta yang telah berjuang memberikan segala sesuatu untuk kehidupan penulis tanpa sedikitpun ada rasa lelah dalam memberikannya. Do’a yang tulus selalu dipanjatkan demi anak terkasih untuk kesuksesan dalam menyelesaikan studi.
6. Mbs Nist beserta suami K.H Munif Zuhri, Mas Imam beserta isteri Mba’ Istighfaroh, Mba’ Mu’awanah beserta suami Hasan Bisri, adikku zhul. Yang selalu memberikan semangat dalam kehidupan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan dan semoga amal dan ibadahnya dicatat sebagai amal kebajikan yang akan dibalas kelak oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis sadar bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masaih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Namun terlepas dari kekurangan yang ada kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis

harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis karya ilmiah dapat memperluas pemahaman kita bersama dalam memahami makna dan substansi pendidikan yang sebenarnya. Semoga bermanfaat.

Hanya ucapan terima kasih yang tidak terhingga yang dapat penulis sampaikan. Semoga amaldan jasa yang baik dari semua pihak diatas diterima oleh Allah SWT. Pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat...Amien.

Semarang, 10 Juli 2008

Ahmad Zainudin

2 1 0 3 2 1 4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IDDAH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Iddah</i>	13
B. Macam-Macam <i>Iddah</i>	19
C. Hikmah <i>Iddah</i>	26
D. <i>Iddah</i> Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Pandangan Ulama'	28

BAB III	: IDDAH WANITA HAMIL AKIBAT ZINA MENURUT ULAMA' HANABILLAH	
	A. Biografi ulama' Hanabillah	34
	B. Iddah Wanita Hamil Akibat Zina Menurut ulama' Hanabillah	45
	C. Istibath Hukum Terhadap Pendapat Ulama' Hanabillah Tentang Iddah Wanita Hamil Akibat Zina	47
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANABILLAH TENTANG IDDAH WANITA HAMIL AKIBAT ZINA	
	A. Analisis Terhadap Latar Belakang Ulama' Hanabillah Tentang <i>Iddah</i> Wanita Hamil Akibat Zina	52
	B. Analisis Terhadap Istibath Hukum Ulama' Hanabillah Tentang <i>Iddah</i> Wanita Hamil Akiba Zina.....	62
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	71
	C. Penutup	71

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat hidup penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah Allah telah meletakkan rasa cinta diantara laki-laki dan perempuan sejak manusia itu diciptakan. Dan Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan supaya saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya rasa saling mengenal maka akan timbul suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang mana ikatan tersebut disebut pernikahan, seperti dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S ar-Rum ayat 21).¹*

Islam memerintahkan kepada para laki-laki dan perempuan untuk segera menikah. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan bahwa tidak menikah itu berarti berpaling dari sunnahnya. Islam pun menekankan pada setiap orang tua untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan.

Pernikahan adalah babak baru dalam rumah tangga untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 644.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam melaksanakan pernikahan diibaratkan membangun sebuah bangunan, sehingga harus dipersiapkan segala sesuatunya karena dengan hal tersebut lah suatu pernikahan akan langgeng dan bahagia.

Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan kehidupan perkawinan sering kandas ditengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang didapati di dalam rumah tangga, tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran bukan kecocokan yang terjadi antara suami dan isteri melainkan semakin menimbulkan perbedaan satu sama lain.

Tidak sedikit pasangan muda atau setelah memiliki anak kemudian berpisah karena tidak menemukan kecocokan dengan pasangannya sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan bercerai. Sebenarnya tidak perlu terjadi perceraian bila berbagai problem rumah tangga dan keluarga bisa diatasi bersama dengan penuh bijaksana seperti masalah ekonomi, krisis cinta atau perselingkuhan.

Dalam al-Qur'an perceraian tidak dianjurkan, tetapi diperlakukan sebagai realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memperbolehkan praktik perceraian dan aturan-aturan yang rinci dan spesifik tentang perceraian bila pasangan suami isteri sudah tidak serasi lagi.³

² Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002, cet. I, hlm. 3.

³ Lynn Wilcox, *Women and The Holy Qur'an*, terj. DICTIA "Wanita dan al-Qur'an dalam Perspektif Sufi", Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, cet. I, hlm. 132.

Jika suatu pernikahan putus, maka sebagai akibat hukum yang wajib diperhatikan oleh yang bersangkutan ialah masa *iddah* dan *ruju*'.⁴ Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang isteri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.⁵

Iddah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah*. Ketika Islam datang, *iddah* terus dijalankan dan diakui karena dalam *iddah* tersebut mengandung kebaikan. Para ulama sepakat bahwa *iddah* hukumnya wajib. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....(البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "Dan perempuan yang tertalak hendaklah ia menahan diri dari tiga kali quru'....."⁶

Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya bagi perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin. Setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. Secara bahasa *iddah* adalah bilangan atau hitungan, karena masa *iddah* itu harus dihitung dengan masa bersih wanita dari haid atau dihitung dengan jumlah bulan. Sedang menurut istilah *iddah* ialah waktu tunggu seorang janda, ia tidak boleh kawin, untuk mengetahui keadaannya mengandung atau tidak, juga sebagai *ta'abud*

⁴ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, 1985, cet. ke-2, hlm. 274.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke-6, hlm. 310.

⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 55.

kepada Allah.⁷ Selain *ta'abud* kepada Allah, *iddah* juga mempunyai tujuan syari'ah diantaranya adalah untuk menjaga keturunan, dari percampuran dengan benih lain (*lima'rifati bara'atu rahim*), *littahayiah* (mempersiapkan diri) dan memberi kesempatan terjadi proses *ruju'*.⁸

Sebenarnya masalah *iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah di sepakati oleh para Ulama' selain juga telah di jelaskan secara *eksplisit* oleh nas Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah* tersebut di hadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka *iddah* tersebut menjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan pengkajian secara lebih cermat.

Bagaimana *iddah* perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa *implikasi* pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara *eksplisit* baik dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Para ulama' madzhab sepakat tentang keharusan *iddah* wanita hamil karena akad, baik akad yang sah, fasid, atau persetubuhan *syubhat* (keliru), namun mereka berbeda pendapat mengenai *iddah* wanita hamil akibat zina.

Pendapat yang mengatakan tidak wajib *iddah* bagi wanita yang hamil akibat zina adalah ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa yang menjadi masalah dalam hal *iddah* bukan pada kehamilan itu, tetapi apakah kehamilan itu

⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet. I, hlm. 369.

⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 176.

menimbulkan nasab atau tidak dengan pria yang menghamilinya. Bila menimbulkan nasab maka ia wajib *iddah* tapi bila tidak menimbulkan nasab maka ia tidak wajib *iddah*.

Sedangkan pendapat ulama' Hanabillah mengatakan bahwa wanita yang hamil akibat zina itu wajib *iddah* dari sebab zina itu, sebagai mana wanita yang ditalaq, pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.⁹

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir” (QS. al-Baqarah; 228)¹⁰.

Dari uraian di atas, penulis berkeinginan membahas tentang kewajiban *iddah* bagi wanita yang hamil akibat zina dalam skripsi dengan judul “Studi Analisis Pendapat ulama' Hanabillah Tentang *iddah* Wanita Hamil Akibat Zina”.

B. Rumusan Masalah.

Setelah penulis mengetahui adanya permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis terdorong mengangkat permasalahan tersebut dalam

⁹ Al-Muwafiq al-Din Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 79.

¹⁰ Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemah, *op.cit* hlm. 55

pembahasan skripsi. Adapun yang menjadi topik permasalahan dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pendapat ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita hamil akibat zina
2. Bagaimana *Istinbat* hukum pendapat ulama' Hanabillah berkaitan dengan *iddah* wanita hamil akibat zina?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat ulama' Hanabillah tentang kewajiban *iddah* wanita hamil akibat zina
2. Untuk mengetahui bagaimana *istinbat* hukum ulama' Hanabillah berkaitan dengan *iddah* wanita hamil akibat zina.

D. Tinjauan pustaka.

Telaah pustaka dimaksudkan dalam rangka mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.¹¹ Dan juga sebagai landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).¹²

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1, Cet. ke-6, 2003, hlm.112.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi1, Cet. ke-11, 1998, hlm. 66.

Dalam skripsi Penelitian mengenai *iddah* sebenarnya sudah banyak dibahas. Dari penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan hasil penelitian dan buku tersebut sebagai berikut:

Hj. Istibsyaroh dalam bukunya yang berjudul: *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, menjelaskan tentang pengertian *iddah*, serta tafsir ayat-ayat al-Qur'an tentang *iddah*.¹³ *Iddah* adalah rentang waktu yang harus dijalani seseorang perempuan yang dicerai hidup atau mati, sebelum ia boleh menikah kembali.

M. Abdul Ghofar dalam bukunya yang berjudul: *Fiqih Wanita*, menjelaskan tentang definisi *iddah*, hukum *iddah* adalah wajib sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 234 dan Al-Ahzab: 49, macam-macam *iddah* dan hikmah disyaratkannya *iddah* adalah memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk serta untuk *libaroati rahim*..¹⁴

Memet Humaedillah dalam bukunya yang berjudul *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, menjelaskan tentang diwajibkannya *iddah* bagi wanita yang hamil akibat zina,¹⁵.

Dalam skripsinya Irni Nafiati, lulus tahun 2003 yang berjudul: *Sudi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa Iddah*, yang menerangkan tentang perempuan yang menikah pada masa *iddah* dan sudah *dukhul* adalah pernikahannya *fasakh* dan mereka harus dipisahkan.

¹³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004, cet. I, hlm. 130-136.

¹⁴ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, cet. ke-2, hlm. 448-449.

¹⁵ Memed Humaedillah, *op cit* hlm 30.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Imroatus sholehah lulus tahun 2007 dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kewajiban Iddah Akibat Percampuran Syubhat*, menerangkan bahwa perempuan yang di-wath'i syubhat wajib untuk menjalani iddah. Karena iddah sendiri mempunyai tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim dan ta'abud.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kajian tentang iddah masih bersifat umum. Disamping itu juga, dapat diketahui bahwa iddah yang penulis teliti berbeda dengan yang lain. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang iddah wanita hamil akibat zina menurut ulama' Hanabillah. Dari penelaahan di atas, maka jelas pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan atau penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan cara penelitian yang akan dilakukan, yang didalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, dalam penelitian, faktor dan data yang hendak disediakan dan analisis data.

Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.¹⁶

Karena penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan maka, penulis membaca buku-buku dan menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh.¹⁷

Maka data-data yang digunakan terdiri dari:

1. Sumber data primer adalah data yang dijadikan sumber wajib dalam penelitian atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya¹⁸ dalam hal ini adalah Kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah.
2. Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan data tambahan dalam rangka untuk membantu dalam penelitian. Data sekunder ini meliputi berbagai bahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan berupa pemikiran tokoh-tokoh lain.

Diantaranya; Kitab *al-Ikhtiyarotul fiqhiyah* karangan Syaikh

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004, hlm.6.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 114

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *op. cit*, hlm. 85.

Islam Ibnu Taimiyah, Status Hukum Akad Nikah wanIta Hamil dan Anaknya karangan Memet Humaedillah, fiqih sunnah 8 karangan Sayyid Sabiq, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dengan menyesuaikan jenis penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, yakni lewat pemahaman, penelusuran dan pemahaman terhadap buku-buku yang relevan dengan materi.¹⁹ Dari sini penulis mengumpulkan berbagai sumber atau buku yang berkaitan erat dengan masalah tersebut, baik dari buku-buku, kitab, majalah, dan sumber dari internet. Tujuan dari dokumentasi ini untuk mengukur kualitas data yang ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.

Sedangkan pendekatan, yang digunakan adalah pendekatan (*approach*)²⁰ *hermeneutik*.²¹ Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa apa yang menjadi obyek kajian adalah hasil dari pendapat Imam Hanbali yang dibukukan oleh Ibnu Qudamah menjadi

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, Jilid 1, Cet. ke-32, 2001, hlm. 9.

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan kata *approach* dengan: 1. Mendekatnya, datangnya. 2. Jalan. 3. Pendekatan dan 4. Pendekatan, penghampian. Namun arti yang tepat dalam hal ini adalah pendekatan. Pendekatan "*to a problem*" yaitu pendekatan pada suatu masalah. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-21, 1995, hlm. 35.

²¹ Kata *hermeneutik* secara harfiah berasal dari kata kerja "*hermeneuein*" yang dalam bahasa Yunani kuno berarti "seni memberi makna atau interpretasi" (*the art of interpretation*). Sedangkan kata bendanya "*hermeneia*" yang berarti interpretasi. Asal-usul kata *hermeneutika* sering dikaitkan dengan kata "*Hermes*", nama seorang tokoh mitologi bangsa Yunani yang berperan sebagai pesuruh dewa-dewa utama yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu atau pesan-pesan kepada manusia. Jadi *hermeneutika* adalah ilmu tentang kaidah yang denganya makna tanda-tanda dikenali. Lihat dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, Cet. ke-2, 2006, hlm. 100, dan dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, *op. cit.*, hlm. 73.

kitab dengan judul al-Mughni, sehingga metode ini memberikan jalan keluar bagaimana menempatkan posisi penafsir, teks yang menjadi obyek untuk ditafsirkan, pemahaman terhadap latar belakang, sejarah dan sosiologis tertentu terhadap persoalan yang menyelimutinya, dan dalam konteks ruang dan waktu. Jadi teks tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat disentuh sehingga dapat sejalan dengan perkembangan zaman, menjadi tidak *stagnan*, fleksibel dalam menafsirkan sebuah teks.

4. . Metode Analisis Data.

Penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat “metode deskriptif” yang berusaha menggambarkan permasalahan yang ada diatas.²²

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan dan menilai data yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan Imam Hanbali.

F. Sistematika Penulisan.

Dalam sistematika penulisan ini secara global terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab pertama merupakan awal dari pembahasan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini diawali dengan pendahuluan yang memuat latar

²² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68.

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berupa tinjauan umum tentang *iddah* yang meliputi beberapa sub bab bagian diantaranya adalah pengertian dan dasar hukum *iddah*, macam-macam *iddah*, hikmah *iddah*, *iddah* wanita hamil akibat zina dalam pandangan Ulama'.

Bab ketiga adalah biografi ulama' Hanabillah, *iddah* wanita hamil akibat zina menurut ulama' Hanabillah, *Istinbath* hukum terhadap pendapat ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita hamil akibat zina.

Bab keempat berupa analisis terhadap pendapat ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita hamil akibat zina, analisis *Istinbath* hukum terhadap pendapat ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita hamil akibat zina.

Bab kelima merupakan proses akhir dari penjelasan beberapa bab sehingga dapat ditarik ke dalam kesimpulan, bab ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAH*

A. Pengertian *Iddah* dan Dasar Hukum *Iddah*.

1. Pengertian *Iddah*

Menurut bahasa arab, kata *iddah* adalah masdar dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu* yang artinya menghitung, jadi kata *iddah* artinya ialah hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus di perhitungkan¹. Maksudnya: perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya².

Sedangkan *iddah* menurut istilah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak boleh kawin bagi perempuan yang di cerai atau ditinggal mati suaminya. *Iddah* ini dengan maksud untuk menentukan hamil tidaknya perempuan itu setelah ditinggal mati atau ditalaq suaminya³.

Menurut istilah yang lain kata *iddah* diartikan sebagai sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkawinan setelah ia ditinggal mati suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru’* atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan⁴.

¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, hlm. 274.

² Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikaah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 24.

³ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 499.

⁴ ppssnh@telkom.net, Kamis, 30 Agustus 2007.

Iddah dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalaq atau bercerai mati⁵.

Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami⁶.

Dalam Ensiklopedi fiqh menurut Umar bin Khattab r.a *iddah* adalah:

الْعِدَّةُ هِيَ تَرْبِصُ الْمَرْأَةِ مُحَدَّدَةٌ شَرْعًا لِمَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ وَمِنْ كُلِّ فَسْخٍ أَوْ تَفْرِيقٍ.

Artinya : *Iddah* adalah penantian seorang wanita dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syara' karena kematian suaminya, perceraian, segala macam fasikh (rusaknya akad nikah) atau pemisahan.⁷

Iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat di tinggal mati suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.⁸

⁵ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, tt, hlm. 177.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, cet. I, 1999, hlm. 637.

⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khattab RA.*, Terj. M. Abdul Mujieb AS (et.al), *Ensiklopedi Fiqih umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. I, 1999, hlm. 160.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 275.

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan *iddah* sebagai Masa yang digunakan untuk membersihkan sesuatu yang tertinggal dari bekas-bekas pernikahan atau persetubuhan”⁹

Iddah dalam istilah Agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan atau (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.¹⁰

Iddah menurut istilah *syara'* Zainudin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani mengartikan *iddah* sebagai masa tunggu yang dilakukan oleh seorang wanita (yang diceraikan) agar dapat diketahui kebersihan rahimnya dari pembuahan (kandungan), atau hanya semata-mata karena *ta'abud* menurut istilah fuqoha artinya ‘suatu hal yang tidak dapat dicerna oleh rasio, baik berupa ibadah atau lainnya’ atau *iddah* dilakukan oleh seorang wanita karena bela sungkawa ditinggal mati suaminya.¹¹

Iddah ialah masa tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah cerai.¹²

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz III, 1410, hlm. 624.

¹⁰ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh Thalib, *fiqh Sunnah* 8, Bandung: al-Ma'arif hlm. 140

¹¹ Zainudin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*: Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm, 1403.

¹² Abdul Fatah Idris, Abu Uhmadi, *Kifayatul Akhyar, Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, tth, hlm. 246.

2. Dasar hukum *iddah*

Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi manusia. salah satu hukum yang terkandung didalamnya adalah aturan-aturan hukum tentang *iddah*. Adapun dalil dari nash Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban *iddah* dan perinciannya adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿البقرة: 228﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir” (QS. al-Baqarah; 228).¹³

Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang ditalak adalah wanita-wanita yang telah pernah campur dengan suaminya, sedang maksud *quru’* disini adalah haid atau suci.¹⁴

Selain ayat 228 juga diterangkan dalam ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ﴿البقرة: 234﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka” (QS. al-Baqarah: 234)¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989, hlm. 55.

¹⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004, cet. I, hlm. 131.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 57.

Ayat ini menjelaskan bahwa *iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya harus menunggu empat bulan sepuluh hari (4 bulan 10 hari) selama ia tidak hamil.

Dalam surat at-Thalaq ayat 4, juga dijelaskan tentang kewajiban *iddah* bagi isteri, yaitu:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق: 4﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara isteri-isterimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka Iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-Thalaq: 4)¹⁶

Maksudnya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) yang diceraikan oleh suaminya maka *iddah* nya adalah tiga bulan (3 bulan) dan wanita-wanita yang tidak haid karena belum dewasa masa *iddah*-nya juga tiga bulan.

Iddah wanita yang sedang hamil ialah hingga melahirkan anak, baik isteri yang hamil itu ditalaq suaminya, ataupun ditinggalkan suaminya lantaran ia berpulang kerahmatullah. *Iddah* perempuan yang tidak berhaid ataupun yang telah putus dengan berhaid, tiga bulan. *Iddah* wanita yang berhaid, tiga kali *quru'* (tiga kali suci dari haid) kalau ia merdeka. Kalau ia budak, dua kali suci.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 946.

Dasar hukum *iddah* dalam KHI pun dijelaskan, yaitu dijelaskan pada Pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4), (5):

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus akibat perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetapi sedangkan bagi perkawinan yang

putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka *iddah*-nya tiga kali suci.¹⁷

B. Macam-Macam *Iddah*.

Macam-macam *iddah* dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. *Iddah* karena cerai mati.

Perempuan yang ditinggal mati suaminya ada beberapa keadaan, yaitu:

- a. Dalam keadaan hamil, *iddah*nya sampai melahirkan

Habisnya *iddah* perempuan hamil ialah sampai melahirkan.

Baik karena talaq atau kematian suaminya¹⁸.

Firman Allah *surat at-Thalaq* : 4

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق: 4﴾

Artinya : "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu , maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan

¹⁷ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet ke-III, 2006, hlm. 70-71

¹⁸ Mustofa Diibulbiga, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, hlm. 409.

*barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS at-Thalaq : 4)*¹⁹

Menunjukkan bahwa sekiranya *ia* hamil dengan anak kembar, maka *iddah*-nya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka *iddah*-nya ialah sesudah melahirkan pula.

Ayat ini menunjukkan bahwa *iddah* perempuan hamil habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhny sudah ditiupkan atau belum.²⁰

- b. Dalam keadaan tidak hamil, *iddah*nya sampai empat bulan sepuluh hari, firmab Allah surat al-Baqarah ayat: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿234﴾

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menangguhkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S al-Baqarah ayat: 234)*²¹.

Apabila isteri diceraikan sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku *iddah* baginya.

¹⁹ Departemen Agama *op.cit*, hlm. 946.

²⁰ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh Tholib, *Fikih Sunnah* 8, Bandung : Al-Ma'arif cet II, th 1983, hlm 148.

²¹ Departemen agama, *op.cit*, hlm.57.

Firman Allah surat al-Ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّيُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
﴿الْأَحْزَابُ: 49﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (QS al-Ahzab : 49).²²

Apabila diceraikan suaminya setelah terjadi hubungan kelamin

(*dukhul*):

- a. Bagi yang masih datang bulan, waktu tungguannya ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.

Firman Allah surat al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة: 228﴾

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru' Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

²² Departemen Agama *op.cit*, hlm. 675.

kelebihan daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ”. (QS surat al-Baqarah : 228).²³

- b. Bagi yang tidak atau belum datang bulan masa *iddah* nya tiga bulan. Tidak datang bulan disini maksudnya adalah karena wanita tersebut sudah memasuki masa bebas haid atau (*monopause*)
- c. Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka *iddah*nya tiga kali waktu suci (ps. 153 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam).
- d. Dalam keadaan isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid bukan karena menyusui maka *iddah* nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali maka *iddah* nya menjadi tiga kali suci.²⁴

Iddah wajib dilakukan seorang isteri karena ditinggal mati suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari penuh, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, sekalipun isteri yang ditinggalkan adalah wanita merdeka dalam *talaq raj'i* dan masih belum digauli karena belum baligh atau penyebab lainnya, sekalipun ia wanita yang mempunyai hitungan *quru'*

Isteri yang ditinggal mati oleh suami, selain melakukan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, diwajibkan pula yaitu *beriddah* (berbela sungkawa). Dengan kata lain, disamping *beriddah* dia pun

²³ Ibid, hlm. 55.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.

harus berbela sungkawa selama itu, tanpa memandang apapun keadaan dirinya, (yakni baik dia sebagai seorang isteri yang berada dalam talaq *raj'i* ataupun belum baligh atau keadaan lainnya, karena berdasarkan Al-Qur'an surat al-Baqarah : 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿البقرة: 234﴾

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggukkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS al-Baqarah: 234).²⁵

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian melakukan *ihdad* (belasungkawa) karena ditinggal mati oleh seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kalau ditinggal mati suaminya, maka masa *ihdad* (belasungkawa) adalah empat bulan sepuluh hari

Dengan kata lain isteri yang ditinggal mati suami diperbolehkan melakukan belasungkawa selama itu, makna yang dimaksud bukannya boleh tetapi wajib, mengingat sesuatu yang diperbolehkan sesudah dilarang hukumnya adalah wajib.²⁶

²⁵ Departemen Agama, *op.cit*, hlm 57

²⁶ Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid II, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 1410-1411.

2. *Iddah* karena perceraian/ *talaq*

Iddah ini memiliki beberapa kemungkinan yaitu : ²⁷

1. Wanita yang di *talaq* suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* ialah sampai melahirkan.
2. Wanita yang di *talaq* suaminya karena masih mempunyai haid, maka *iddahnya* ialah tiga kali suci.

Dengan tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang di cerai suaminya dalam keadaan haid, ia dapat menjadikan masa-masa haid sebagai patokan waktu. Sedangkan *iddah*-nya adalah tiga *quru'*. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿البقرة: 228﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir” (QS. al-Baqarah; 228).²⁸

Dalam hal ini, yang diperhitungkan batas waktunya dengan tiga (3) *quru'* (haid atau suci) hanyalah akibat dari perceraian (*talaq*). Kata *quru* dalam kalimat di atas mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid. Masa suci yang dimaksud adalah antara dua masa darah kotor, masa berakhirnya *iddah* dengan habisnya masa suci yang ketiga.

²⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm.147.

²⁸ Departemen Agama *loc.cit*, hlm. 55.

Masa haid adalah apabila berakhir masa haid yang ketiga habislah masa *iddah*-nya.²⁹

3. Wanita yang *ditalaq* suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia, maka *iddah*-nya adalah tiga bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-*Thalaq*: 4

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق: 4﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara isteri-isterimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka Iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-Thalaq: 4).³⁰

4. Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada *iddah* baginya. Sebagaimana Firman Allah:

Hal ini diterangkan dalam firman Allah Surat al-Ahzab ayat

49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
﴿49﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

²⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet. I, hlm. 370

³⁰ Hady Mufaat, *Fikih Munakahat* (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya), Duta Grafika, 1992, hlm. 229.

*mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS.: al-Ahzab: 49).*³¹

C. Hikmah *iddah*

Isteri yang diceraikan suaminya sesudah dicampurinya harus ber*iddah* lebih dahulu. Hikmahnya ialah supaya dalam waktu *iddah* talaq *raj'i* kedua suami-isteri berfikir panjang dan merasakan bagaimana pahit getirnya perceraian kedua belah pihak dalam beberapa minggu lamanya. Kalau masih ada cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, tentu keduanya akan berkumpul kembali memperbaiki kehidupan suami-isteri dengan rujuknya bekas suami dengan bekas isterinya itu.

Apabila terjadi perselisihan dan salah faham antara kedua belah pihak, sehingga suami menjatuhkan talaq yang kedua maka dalam waktu *talaq raj'i* yang kedua itu, ada pula kesempatan untuk berfikir panjang, bagaiman baik buruknya kala perceraian itu diteruskan selamanya.

Apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat sampai tiga kali dan tidak ada jalan lagi untuk mndamaikan keduanya, maka waktu itulah baru jatuh *talaq* tiga, *talaq bain* besar (kubro) yang tidak ada harapan lagi untuk keduanya berkumpul sebagai suami-isteri, kecuali jika bekas isteri nikah dulu dengan laki-laki lain.³²

³¹ Departemen Agama RI, *loc.cit*, hlm. 675.

³² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawina Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1403 H, hlm 143.

Hikmah lain yang terkandung dalam *iddah* setelah pisah adalah karena Allah yang maha bijaksana kalau menyuruh hamba-Nya untuk melaksanakan kewajiban haruslah menentukan waktu sarana yang diperlukan sehingga ia mengerti benar terhadap perintah. Allah SWT menjadikan masa *iddah* sebagai pemisah setelah *dukhul* (*jima'*) dengan segala sifatnya. Masalah ini berlaku sama untuk orang khusus atau umum, pandai atau pintar.

Seorang laki-laki asing tidak boleh menikahi wanita yang sedang dalam masa *iddah*, sesuai dengan firman Allah (surat al-Baqarah : 235).

﴿235﴾ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya : *Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya.* (surat al-Baqarah : 235)³³.

Setelah ditetapkannya *iddah* bagi seorang isteri setelah putus perkawinannya, mengandung beberapa hikmah antara lain :

1. *Iddah* bagi seorang isteri yang ditalaq *raj'i*.

Iddah bagi seorang isteri yang ditalaq *raj'i* oleh suaminya mengandung arti

- a. Memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami isteri untuk berfikir,
- b. Merenugkan dan memperbaiki diri dan pribadi masing-masing
- c. Memahami kekurangan dan mempertimbangkan kemaslahatan hidup bersama dimasa yang akan datang.
- d. Mempertimbangkan nasib anak-anaknya.

2. *Iddah* bagi isteri yang ditalaq *ba'in*

³³ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 57.

Iddah bagi isteri yang ditalaq *ba'in* oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan Pengadilan berfungsi antara lain :

- a. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan isteri dari akibat hubungannya dengan suami.
- b. *Iddah* memberi kesempatan kepada bekas suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas isteri selama dalam masa *iddah* tersebut jika hal itu dipandang mashlahat.

3. *Iddah* bagi isteri yang ditinggal mati suamiya.

Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dalam rangka berbela sungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya itu, menormalisir kegoncangan jiwa akibat ditinggal oleh suaminya itu.³⁴

D. *Iddah* Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Pandangan Ulama'.

Para ulama' Mazhab sependapat tentang keharusan *iddah* bagi wanita hamil karena akad, baik akad yang sah, fasid, maupun persetubuhan *syubhat* (keliru), namun mereka berpendapat dalam hal *iddah* wanita hamil akibat zina.

Hanafi, Syafi'i dan mayoritas ulama' mazhab Imamiyah mengatakan wanita yang berzina tidak wajib beriddah, sebab sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati. Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang melakukan zina, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun dia dalam keadaan hamil.

³⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : 1984/1985, Hlm. 277

Menurut Imam Malik wanita yang dicampuri dalam bentuk zina persis sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat, dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *iddah*, kecuali bila dikehendaki untuk dilakukan *hadd* (hukuman) atas dirinya. Pada saat itu, dia menyucikan dirinya satu kali haid.

Sementara ulama' Hanabillah mengatakan wanita yang berzina wajib menjalani *iddah* seperti halnya pada wanita yang ditalaq.³⁵

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa tidak *iddah* bagi wanita hamil akibat zina

أَمَّا الْحُبْلَى مِنْ زَنَاءٍ فَأَيَّهَا لِأَعِدَّةٍ عَلَيْهَا³⁶

Artinya: “Adapun hamil karena perzinaan, sesungguhnya tidak ada *iddah* bagi wanita yang hamil”.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah adalah bahwa *iddah* diwajibkan dalam rangka memelihara nasab, sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab.

لَأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ النَّسَبِ, وَالزَّانِيَ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ³⁷ ...

Artinya: “karena sesungguhnya *iddah* (diwajibkan) untuk memelihara nasab, sedangkan nasab tidak bisa dihubungkan dengan laki-laki yang berzina”.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada *iddah* bagi wanita yang hamil akibat zina.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniya, trj: Masykur AB dkk, *Al-Fiqh 'Ala Al- Mazdhabil Al-Khamsah*, Jakarta: Lentera 2007, hlm. 474

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 969) juz IV, hlm 521

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Beirut: Darul-Fikr 1983, Jilid II, hlm. 282.

أَمْ وَطْءُ الزَّانَا فَإِنَّهُ لَاعِدَّةٌ عَلَيْهِ³⁸ ...

Artinya: “Adapun persetubuhan zina sesungguhnya tiddak menimbulkan iddah dalam persetubuhan itu”.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama’ Syafi’iyah sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyah

Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa sebab-sebab timbulnya *iddah* karena dua hal : diceraikan suami dalam keadaan hidup, baik dengan talak ataupun dengan fasakh nikah, dan karena ditinggal mati suami. Adapun masa menunggu akibat persetubuhan zina tidak dinamakan *iddah*, tetapi *istibra’* dengan ukuran *iddah*.

Dengan demikian, terhadap wanita yang hamil karena zina tetap diberlakukan masa menunggu yang disebut *istibra’* dan tentunya *istibra’* wanita yang hamil tidak akan tercapai kecuali dengan melahirkan anaknya.³⁹

Wahbah az-Zuhaili berpendapat dalam buku “Status Hukum Akad Nikah Wanita dan Anakannya” karangan Memed Humaedillah bahwa ulama’ Hanabilah mewajibkan *iddah* wanita yang hamil akibat zina.

وَأَوْجِبُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ خِلَافًا لِغَيْرِهِمْ الْعِدَّةَ عَلَى مَرْئِي بِهَا كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَفْتَضِي شُغْلَ الرَّحِمِ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ⁴⁰

Artinya : “ Berbeda dengan pendapat para ulama’ dari madzhab yang lain, ulama; madzhab malikiyah dan hanabillah mewajibkan iddah atas wanita yang dizinai sebagaimana diwajibkan iddah terhadap wanita yang disetubuhi dengan syubhat (keliru) karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang bisa berakibat

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, hlm. 523.

³⁹ Memed Humaedillah, *op.cit*, hlm. 28.

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, hlm. 630

berfungsinya rahim. Karenanya wajib iddah dari persetubuhan zina sebagaimana perseubuhan syubhat”.

Dalam pandangan yang lain juga berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak harus dinikahi hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya itu, pandangan ini dikemukakan oleh Imam Rabi’ah, as-Tsauri, al-Auza’ie dan Ishaq, dan pandangan ini merupakan pegangan Madzhab Imam Malik dan Imam Ahmad, karena menurut mereka wanita yang melakukan persetubuhan zina wajib atasnya *iddah* yaitu selama tiga kali haid atau tiga bulan atau dengan melahirkan anaknya jika ia hamil⁴¹.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman diantara para ulama’ mengenai *iddah*. Meskipun keduanya tentunya sama-sama mengetahui bahwa tujuan dari *iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, namun bagi ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah dalam wanita hamil, yang menjadi masalah bukan pada kehamilan itu sendiri, tapi apakah kehamilan itu menimbulkan nasab atau tidak dengan laki-laki yang menghamilinya. Bila menimbulkan nasab ia wajib *iddah* tapi bila tidak menimbulkan nasab ia tidak wajib *iddah*, sementara itu hubungan nasab hanya ada bila terjadi akad nikah. Artinya wanita yang hamil dan anaknya yang ada dalam kandungannya itu ada yang memiliki, yaitu suami dan ayahnya. Dalam hal wanita hamil akibat zina, jelas bahwa wanita dan anak yang ada dalam kandungannya tidak ada laki-laki yang memiliki karena tidak ada akad. Dengan demikian wanita yang hamil akibat zina tidak wajib *iddah*.

⁴¹ ppssnh@telkom net, 30 Agustus 2007.

Bagi ulama' Malikiyah dan Hanabillah, yang menjadi masalah dalam hal *iddah* bukan pada kehamilannya yang menimbulkan nasab atau tidak, melainkan pada persetubuhan yang bisa menyebabkan kehamilan. Sebab adanya akad tidak bisa dijadikan pedoman, terbukti wanita yang menikah bila ia belum disetubuhi ia tidak wajib *iddah*. Artinya persetubuhan itulah yang menjadi dasar ada atau tidaknya *iddah*.

Dengan demikian, karena salah satu dari tujuan *iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim, bila wanita berzina kemudian ia hamil ia wajib *iddah* karena sudah terbukti rahimnya tidak bersih, bahkan seandainya tidak hamilpun wanita yang berzina tetap wajib *iddah* dengan tiga kali haid karena ia sudah melakukan persetubuhan.⁴²

Wanita yang hamil karena berzina tidak harus dinikahi sehingga ia melahirkan anaknya. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Rabi'ah, as-Tsauri, al-Auza'ie dan Ishaq, karena menurut mereka wanita yang melakukan persetubuhan zina wajib ber*iddah* selama tiga kali haid atau tiga bulan (mengikuti pendapat Imam Malik) atau dengan melahirkan anaknya jika ia hamil. Jika wanita yang berzina itu mempunyai suami haram suaminya itu mensetubuhi hingga tamat *iddah*nya itu.

Kesimpulannya wanita yang berzina tidak harus dikawini kecuali tamat *iddah*-nya yaitu tiga kali suci atau tiga bulan. Jika ia hamil tidak harus dikawini kecuali setelah melahirkan anaknya.

⁴² Memed Humaedillah, *op.cit*, hlm. 30.

Disamping itu mereka menambahkan satu lagi syaratnya yaitu hendaklah ia bertaubat dari zina.⁴³

⁴³ ppssnh@telkom net, 15 Juni 2007.

BAB III

IDDAAH WANITA HAMIL AKIBAT ZINA MENURUT ULAMA'

HANABILLAH

A. Profil Mazhab Hanbali

Pendapat atau kesimpulan (mazhab) yang dihubungkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali adalah aliran hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah Raulullah SAW.

Berdasarkan periodenya mazhab Hanbali menempati urutan keempat setelah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab ini terkenal ketat berpegang pada sunnah nabi Saw setelah al-Qur'an, sehingga ada yang menyebutnya sebagai fiqh sunnah. Mazhab ini juga berpegang pada fatwa sahabat.

Mazhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya. Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad pada akhir abad kedua H dan pada awal abad ke tiga H. Pada mulanya Imam Ahmad bin Hanbal belajar fiqh aliran *rakyyu* kepada Imam Abu Yusuf di Bahgdad. Sedangkan bidang Hadis didalamnya terutama dari Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim al-Wasit juga di Baghdad. Dalam rangka menimba ilmu ia mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Kuffah, Basrah, Madinah, Makkah, Yaman. Di Mekkah ia sempat berguru mendalami fiqh dan ushul fiqh kepada Imam Syafi'i¹

Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia,

¹ Abdul Azis Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 514.

juga Imam bagi *Darul Salam*, Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, juga seorang yang *zuhud*, penerang bagi dunia juga sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi cobaan, seorang yang saleh dan *zuhud*²..

Ahmad lahir di Baghdad Irak tahun 164 H/780 M. Ayahnya menjabat sebagai wali kota Sarkhas dan pendukung pemerintahan Abasiyah. Sejak kecil Imam Al Faqih Al Muhaddisi ini sudah kelihatan cerdas. Ia mulai belajar hadits pada usia 16 tahun³.

Setelah sekian lama menuntut ilmu pada waktu berumur 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal kembali lagi ke Baghdad dan mencapai tingkat kealimannya yang memungkinkan ia melakukan ijtihad secara mandiri. Dari kemandiriannya berijtihad itu ia tidak menghiraukan apakah pendapatnya sama atau berbeda dengan mujtahid lainnya, bahkan dengan gurunya sendiri dengan bekal kemampuannya ia mendirikan *halaqah* pengajian. Melalui *halaqah* pengajiannya itu ia mengajarka Hadis dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal dengan mazhab Hanbali.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang metode istinbathnya (ushul fiqh) dapat dibacadalam kitabnya yang berjudul ar-Risalah, Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan buku tentang metode istinbath. Metode istinbathnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam membentuk mazhabnya diperoleh melalui pernyataan-pernyataanya mengenai hal itu.

² Ahmad asy-Syurbasi, Terj. Sabil Huda, H.A. Ahmadi, *Sejarah Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Syafi'i Maliki Hanbali*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993, hlm 190.

³ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPKSM, Tompeyan TR III/133, 2001, hlm. 105

Ibnu Qoyyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lam al muwwafiq'inan Rabbi al-Amin* menyebutkan bahwa fiqih Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima landasan yaitu:

1. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw
2. Fatwa sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan dikalangan mereka maupun yang diperselisihkan.
3. Hadis *mursal*.
4. Hadis *dhaif*.
5. Qiyas.

Yang paling berpengaruh terhadap pembentukan mazhabnya selain nas adalah fatwa sahabat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW disebut sejajar pada tingkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya kehujahan sunnah Nabi SAW ditetapkan dengan al-Qu'an, dan Sunnah Nabi SAW itu sendiri adalah penjelasan langsung dari fihak yang ditunjuk Allah SWT terhadap isi al-Qu'an. Namun demikian pada prakteknya pada Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan hukum, sunnah Rasulullah SAW diletakkan pada urutan kedua setelah al-Qur'an.

Bagi Imam Ahmad bin Hanbal jika sudah ditemukan nas hadis Nabi SAW yang dianggapnya sah dijadikan sebagai sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapat itu berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang pada sunnah Nabi SAW, disamping al-Qur'an dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengannya merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam pembentukan mazhab Hanbali. Hal

tersebut didasarkan pada sabda Nabi SAW “Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak datang dari kami maka amalan itu ditolak” (HR Ahmad in Hanbal dan Muslim). Oleh karena keteguhannya berpegang pada sunnah Rasulullah SAW itu. Maka fiqihnya dikenal dengan fiqih sunnah.

Menurut Salim Ali as Saqofi (guru besar fiqih Universitas Umm al-Qura’ Makkah) setelah sunnah Rasulullah Imam Ahmad bin Hanbal juga berpegang pada *ijma*; sahabat bila benar terjadi. Misalnya *ijma*’ sahabat tentang wajibnya salat lima waktu, puasa, zakat dan haji, sebagai hal-hal yang telah diketahui umum dalam agama Islam. Jika *ijma*’ itu benar-benar terjadi namun diingkari maka pengingkarnya akan menjadi kafir.

Setelah hukum suatu masalah tidak dapat dalam sumber-sumber tersebut diatas, ia berpegang pada pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui ada yang menentanginya. Namun dalam hal itu ia tidak mengatakan sebagai *ijma*’ meskipun diakuinya lebih kuat dari pendapat perorangan. Menurutnya tidak diketahui perbedaan pendapat tentang suatu masalah tidak dapat dijadikan bukti bahwa hal itu telah disepakati semua ulama’. Sedangkan *ijma*’ menurutnya baru dianggap terjadi bila masing-masing ulama’ secara tegas menyatakan persetujuannya.

Selanjutnya ia tidak berpegang pada fatwa sahabat yang diperselisihkan, dengan cara memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qu’an dan sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini al Saqafi menjelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berpegang teguh pada metode *salaf*, yaitu sahabat dan dalam banyak hal hampir bersamaan menggunakan metode yang

dugunakan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam syafi'i merupakan dua orang tokoh yang sama-sama berada dalam mata rantai aliran Hadis dalam pembentukan mazhab fiqih, meskipun keterikatan Imam Ahmad bin Hanbal lebih banya mengetahui pendapat sahabat sehingga banyak mewarnai mazhabnya.

Ibnu qoyyim menjelaskan bahwa seseorang yang memperhatikan mazhab Hanbali dan fatwa sahabat akan membuktikan kesesuaian akan keduanya dan seolah-olah dan keluar dari satu muara. Sampai-sampai jika terdapat dua pendapat dikalangan sahabat niscaya akan ditemukan dua riwayat persis seperti itu pula dari Imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Ahmad bin Hanbal secara mendetail menukil pendapat-pendapat sahabat dalam membentuk mazhabnya. Hal yang sama dilakukan para muridnya terhadap pendapatnya. Jika tidak didapatkan hukum suatu masalah dalam fatwa-fatwa sahabat, maka hadis *mursal* diterimanya dalam menentukan suatu hukum. Bukan saja Hadis *mursal sahabi* (Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang sahabat, tetapi ia tidak mendengar secara langsung dari Nabi SAW) seperti yang banyak diterima oleh ulama' mujtahid, tetapi *mursal at-tabi'i* (Hadis yang diriwayatkan generasi langsung sesudah *tabi'in* dan sahabat yang menerima Hadis itu dari Nabi SAW). Bagi Imam Ahmad bin Hanbal kedua bentuk Hadis *mursal* tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum bila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam sumber tersebut sebelumnya.

Selanjutnya ia berpegang pada Hadis *dhaif* selama tidak menyangkut masalah-masalah hukum. Imam Ahmad bin Hanbal menerima Hadis *dhaif* yang bertalian *ihwal* keutamaan *amaliyah*. Ia menerima Hadis *dhaif* selama *kedhaifannya* tidak disebabkan perawinya terkenal pembohong. Dalam hal itu ungkpnnya yang terkenal adalah. “Berpegang pada Hadis *dhaif* lebih aku sukai dari pada berfatwa dengan semata-mata mengandalkan rasio”. Perlu dicatat disini bahwa Hadis *dhaif* yang dimaksud disini adalah Hadis Hasan. Karena sikap kepatuhannya yang begitu kuat terhadap Hadis dan fatwa sahabat, maka mudah dimengerti bahwa Ahmad bin Hanbal lebih mengutamakan riwayat dari pada penalaran akal.

Ijtihad baru digunakan bila hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, metode ijtihadnya yang pertama dipakai adalah *qiyas*. Dalam masalah *qiyas* Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak akan bisa melepaskan diri dari *qiyas*, *qiyas* merupakan suatu keharusan bagi seorang *mufti* yang ingin berfatwa, karena dalam kehidupan manusia akan ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam teks-teks al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW dan seorang ahli hukum tidak akan menemukan hukum segala peristiwa didalam dua sumber tersebut serta tidak pula dalam fatwa-fatwa sahabat. Oleh karena itu untuk mrnghindarkan suatu kekosongan hukum *qiyas* perlu dilakukan untuk menghilangkan kesempitan.

As-Saqafi menjelaskan bahwa selain melakukan *qiyas* dalam pembentukan mazhabnya Ahmad bin Hanbal juga menggunakan metode

ijtihad lainnya, seperti *ihhtisan*, *istishab*, *sadd az-zari'ah* dan *al-maslahah mursalah*. Meskipun mazhab Hanbali berprinsip bahwa banyak sumber hukum yang bisa dirujuk sebelum melakukan ijtihad, namun bukan berarti mazhabnya menjadi kaku dalam bidang *muamalah*, mazhab ini dikenal pantas karena didukung oleh kaidah yang mengatakan bahwa “pada dasarnya setiap akad dan syarat adalah sah dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang”. Pada dasarnya berbagai bentuk akad dan syarat adalah terlarang kecuali ada izin dari *syara'*. Kaidah yang disebut pertama tidak hanya diakui oleh mazhab Hanbali tetapi diakui oleh mazhab lainnya. Mazhab Hanbali dianggap lebih luwes dalam penggunaannya, baik dalam bentuk akad maupun persyaratannya.

Beberapa contoh berikut menggambarkan keluwesan fatwa dalam mazhab Hanbali, dalam pelaksanaan akad nikah menurutnya calon isteri boleh membuat persyaratan misalnya ia hanya mau dinikahi kalau tidak dimadu atau tidak dibawa pindah dari rumah orang tuanya. Jika calon suami menyetujui maka ia terikat dengan persyaratan tersebut, karena jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi isteri dibenarkan menuntut *fasakh*.

Selanjutnya dalam jual belipihak penjual boleh mensyaratkan bahwa ia akan menjual benda yang dimilikinya dengan syarat jika nanti pihak pembeli mau menjualnya. Maka dirinyalah yang lebih banyak membeli. Pihak pembeli terikat dengan persyaratan tersebut dan tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selama pihak penjual pertama menghendaknya. Contoh lain dalam jual beli adalah penjual boleh mensyaratkan bahwa ia hanya mau menjual

benda dengan syarat setelah jual beli untuk waktu tertentu ia tetap dapat memanfaatkannya, selain itu jual beli boleh dilakukan dengan lebih dulu membayar uang muka sebagai tanda jadi kepada pihak penjual. Jika ternyata jual beli tidak jadi dilaksanakan oleh pembeli maka uang sebagai tanda jadi itu menjadi milik penjual.

Contoh fatwa lainnya adalah dalam bidang ibadah. Pertama orang yang tertidur sambil berdiri duduk atau sedang *rukuk* sehingga tersungkur maka tidak batal wudhunya. Kedua untuk menyapu muka dan tangan melalui tayamum cukup dengan sekali tepukan ketanah sekaligus untuk disapukan kepada keduanya.

Dibandingkan dengan mazhab-mazhab fiqih besar lainnya, mazhab Hanbali dalam perkembangannya lebih sedikit pengikutnya. Tidak pesatnya perkembangan mazhab ini seperti dikomentari oleh *Manna al-Qattan* (ahli fiqih Mesir). Antara lain karena para tokoh pengikutnya tidak suka memegang jabatan di pemerintahan (misalnya menjadi hakim dipengadilan) sehingga perkembangan mazhab ini tidak didukung oleh kekuasaan. Mazhab Hanbali saat ini menjadi mazhab resmi di kerajaan Arab Saudi yang menerapkan syari'at Islam secara utuh baik dalam bidang *al ahwal asy syakhsiyah* (hukum keluarga) hukum perdata dan *hudud* (hukum tentang zina, pencuri dan perampok)

Fatwa Ahmad bin Hanbal pada umumnya tidak dibukukan sendiri, tetapi dicatat oleh para muridnya. Dan sekalian buku yang disusunnya seperti yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Abdur Rahman as-Said (ahli fiqih Arab

Saudi). Bila dilihat berdasarkan judulnya buku yang secara khusus berisi tentang hukum Islam hanya buku yang berjudul *al-manasiq al-qubra wa as sugra dan al-usyribah* buku lainnya mengenai Hadis Nabi SAW, al-Qur'an, *tarikh*, dan keutamaan sahabat, namun fatwa-fatwanya sempat dihimpun oleh murid dan para pengikutnyayang datang kemudian antara lain *masa'il al-imam ahmad bin hanbal* oleh Ishaq bin Ibrahim bin Hani an-Naisanburi (w.311 H) buku ini diberi komentar oleh Zuhai asy-Syawwisi dan diterbitkan pertama kali tahun 1400 H di Beirut.

Karya terbesar yang memuat mazhab Hanbali adalah kitab *al-jami' al-kabir* karya Ahmad bin Muhammad al-Khalal (w.311 H). Buku ini adalah hasil koleksi al-Khalal setelah beberapa tahun mengadakan perjalanan ilmiah menemui murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal di berbagai negeri, terutama berkat persahabatannya dengan beberapa orang alim murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mendengar langsung fatwa-fatwanya, antara lain Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Maruzi (w.275) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290 H) dan Saleh bin Ahmad bin Hanbal (w. 266 H) Menurut Abdul Aziz Abdur Rahman as-Sa'id, buku ini terdiri dari dua ratus juz, namun masih dalam bentuk *manuskrip* yang tersimpan disebuah perpustakaan di Inggris.

Kitab fiqih lainnya adalah yang berjudul *al-Mukhtasar* yang dikenal dengan judul *mukhtasar al-khiraqi*, karya Abu Hasim Umar bin Husain al-Hanbali (w. 334 H). Hingga saat ini buku tersebut telah dicetak ulang

beberapa kali dan telah di syarah oleh banyak ulama', antara lain yang paling terkenal adalah karangan Ibnu Qudamah berjudul *al-mughni*.

B. Iddah Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Ulama' Hanabillah

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa Ulama' Hanabilah mewajibkan *iddah* atas wanita yang hamil akibat zina:

وَأَوْجِبُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ خِلَافًا لِغَيْرِهِمُ الْعِدَّةَ عَلَى الْمَرْءِ بِهَا كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّهُ وَطِءٌ يَقْتَضِي شُغْلَ الرَّحِمِ فَوَجَبَتْ أَلْعِدَّةُ مِنْهُ كَوَطِءِ الشُّبْهَةِ

Berbeda dengan pendapat para ulama' dari mazhab yang lain, ulama' mazhab Milikiyah dan Hanabillah mewajibkan *iddah* atas wanita yang dizinai sebagai mana diwajibkan *iddah* terhadap wanita yang disetubuhi dengan *syubhat* (keliru) karena sesungguhnya zina adalah suatu persetubuhan yang bisa berakibat berfungsinya rahim. Karenanya wajib *iddah* dari persetubuhan zina sebagaimana terhadap persetubuhan *syubhat*, hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Hasan dan Nakho'i.

وَالْمَرْءُ بِهَا كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ⁴

Artinya: Perempuan yang berzina itu iddahnya seperti perempuan yang di wat'I syubhat.

Zina itu seperti *wat'I* yang menyebabkan berfungsinya rahim, maka wajib *iddah* dari sebab zina itu sebagaimana *wat'I syubhat*. Adapun kewajiban *iddah*-nya seperti *iddah*-nya perempuan yang di *talaq*

⁴ Al-Imam Muwafiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al- Maqdisi, *al-Mughni*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 79

Mengenai batas tenggang masa *iddah* ulama' Hanabillah mendasarkan hukumnya pada surat al-Baqarah ayat 228 yaitu tiga kali *quru'* bagi wanita yang mempunyai masa haid dan surat al-Thalaq ayat 4 sampai melahirkan bagi yang mengandung. *Iddah* wanita zina diqiyaskan hanya dengan wanita yang ditalaq. Ini dapat dimengerti dari ungkapan bahwa *iddah* bagi wanita yang berzina sama dengan *iddah* wanita yang ditalaq karena nikah sah. ulama' Hanabillah tidak mengqiyaskan dengan wanita yang berpisah dengan suaminya karena meninggal.

Dari ayat diatas (surat al-Baqarah ayat 228 dan surat at-Thalaq ayat 4) yang menjadi dasar ulama' Hanabillah dalam menentukan batas masa *iddah* wanita yang zina dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jika wanita yang berzina tersebut hamil maka *iddah-nya* sampai melahirkan.
2. Dan apabila wanita yang berzina tersebut tidak hamil maka masa *iddah-nya* tiga kali *quru'*.

Disinilah *iddah* sangat diperlukan apakah dalam rahim perempuan yang zina itu terjadi pembuahan janin atau tidak. Apabila rahim tersebut ternyata berbuah (hamil), maka dengan sendirinya wanita tersebut harus menunggu hingga melahirkan. Karena nantinya nasab anak yang ada dalam kandungannya tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang menzinainya tetapi dinisbatkan kepada ibunya.

Bagi ulama' Hanabillah yang menjadi masalah dalam hal *iddah* bukan pada kehamilan yang menimbulkan nasab atau tidak, melainkan pada

persetubuhan yang bisa menyebabkan kehamilan, sebabnya adanya akad tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, terbukti bila wanita berakad bila ia diceraikan oleh suaminya sebelum disetubuhi ia tidak wajib *iddah*, artinya persetubuhan itulah yang menjadi dasar ada atau tidak adanya *iddah*.⁵

Dengan demikian, karena salah satu tujuan dari *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, bila seorang wanita berzina kemudian ia hamil, ia wajib *iddah* karena sudah terbukti rahimnya sudah tidak bersih, bahkan seandainya tidak hamilpun wanita yang berzina tetap wajib *iddah* dengan tiga kali haid karena ia sudah melakukan persetubuhan.

C. Istinbath Hukum Pendapat Ulama' Hanabillah tentang *Iddah* Wanita Hamil Akibat Zina.

Imam Hanbali dalam menetapkan suatu hukum dengan berlandaskan kepada dasar-dasar sebagai berikut:

1. Nash Al-Qur'an dan *Hadīs*, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.

Al-Qur'an menempati posisi yang sangat fundamental dalam istinbat hukum Imam Hanbali. Al-Quran dengan sebutan apapun adalah firman Allah yang mengandung Mu'jizat diturunkan

⁵ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm 30

pada Muhammad Saw ditulis dalam beberapa *Mushaf* serta bersifat *Mutawatir* dan bernilai ibadah jika dibaca⁶.

Kebenaran al-Quran tidak dapat diragukan, karena kemutawatiran dalam penyampaian al-Qur'an oleh Nabi pada sahabat merupakan hal yang tidak dapat dibantah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an jika melakukan istinbat hukum, seperti adanya ayat-ayat *haqiqoh* dan majazi, *muhkam* dan *mutasyabihat*, *nasikh* dan *mansukh*.

Mengikuti sunnah Nabi adalah wajib, sesuai dengan firman Allah:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
(ال عمران: ٣٢)

Artinya: "Katakanlah: Taatilah Allah dan rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (QS. Ali Imran: 32)⁷

2. Fatwa Sahaby, yaitu ketika beliau tidak memperoleh nas dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentanginya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat ini merupakan *ijma'*.

Dalam menetapkan fatwa-fatwa sahabat sebagai hujjah, jumhur fuqoha mengemukakan beberapa argumentasi baik dengan dalil

⁶ Ma'mun Efendi Nur, *Konsep Fiqh Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Surabaya: Bintang Pelajar, 2006, hlm. 13.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 80

aqli maupun dalil *naqli*, kepercayaan umat terhadap fatwa sahabat berarti menjadikan fatwa sahabat sebagai rujukan karena kepercayaan sahabat kepada Nabi berarti kembalinya mereka kepada petunjuk nabi Muhammad SAW⁸.

3. Pendapat sebagian sahabat, yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
4. *Hadīs* Mursal atau *hadīs* Daif, *hadīs* Mursal atau *hadīs* Daif akan tetap dipakai, jika tidak berlawanan dengan suatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat.
5. Qiyas⁹, baru beliau pakai apabila beliau memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan diatas.

Qiyas dalam fiqih Islam adalah:

Asy Syaukani menta'rifkan *qiyas* dengan perkataannya:

اِسْتِخْرَاجُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِمَا يُذَكَّرُ بِجَا مَعِ بَيْنَهُمَا

“Mengeluarkan hukum yang telah disebutkan untuk yang belum disebutkan lantaran ada pengumpul diantara keduanya”¹⁰

Perlu diingat bahwa *qiyas* yang mendapat porsi yang kecil dalam penetapan suatu hukum (berdasarkan urutan sumber yang

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 329.

⁹ Kata *qiyas* adalah bentuk masdar dari q-y-s yang berarti mengukur, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa

Asal kata *qiyas* adalah q-w-s, kedua pendapat ini sama kuatnya, karena dalam bahasa arab keduanya mempunyai arti yang sama dan sama-sama digunakan. Orang arab mengatakan qis al-rumh atau qas al-rumh keduanya berarti ukurlah tombak. Baca Muhammad Roy Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles (pelacakan aristoteles dalam *qiyas ushul fiqih*) Yogyakarta: satria Insani Press, 2004, hlm. 45.

¹⁰ TM. Hasbi Ash-Shieddieqy, *op.cit*, hlm 68.

digunakan) biasa saja porsi yang kecil itu menyelesaikan berbagai masalah walaupun bagaimana banyaknya, apabila tidak ditemukan hukum dalam nas (al-Qur'an dan sunnah). Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa masa yang akan mendatang *qiyas* memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukum dalam sumber-sumber hukum selain daripada *qiyas* itu. Jalan keluar ini tentu tertuju pada golongan Hanabillah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Imam Ahmad bin Hanbal ¹¹.

Metode istinbat ulama' Hanabillah yang menjadi landasan berliau dalam menggali hukum, seperti pendapat beliau tetang *iddah* perempuan yang berzina adalah dalil al-Qur'an, tapi dia tidak menjelaskan metode apa yang digunakan saat melakukan istinbat tersebut.

Ulama' Hanabillah menyatakan Pendapat bahwa *iddah* untuk mengetahui kondisi rahim memang berbeda dengan ulama lainnya, seperti dengan ulama Syafi'iyah yang mengatakan *iddah* berfungsi memelihara nasab, sedang perempuan zina tidak menimbulkan hubungan nasab. Ini merupakan konsekwensi dari pendapatnya bahwa nikah bagi ulama Syafi'iyah adalah aqad, dan aqad ini yang menimbulkan hubungan nasab keluarga

Mengenai batas tenggang masa *iddah*. ulama' Hanabillah mendasarkan hukumnya pada surat al-Baqarah ayat 228 tiga *quru'* bagi wanita yang mempunyai masa haid dan surat al-Thalaq ayat 4 sampai

¹¹ M. Ali Hasan, *loc.cit*, hlm. : 230-231

melahirkan bagi yang mengandung. *Iddah* wanita yang berzina diqiyaskan hanya dengan wanita yang di-*thalaq*. Ini dapat dimengerti dari ungkapannya bahwa *iddah* bagi wanita yang berzina sama dengan *iddah* bagi wanita yang ditalaq karena nikah shahih. Ulama' Hanabillah tidak mengqiyaskan dengan wanita yang berpisah dari suaminya karena meninggal.

Tapi yang menjadi kritik dari penyandaran hukum yang digunakan ulama' Hanabillah bahwa kalimat *talaq* dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang disingung oleh Allah adalah terjadi karena adanya *aqad* pernikahan, maka penarikan surat al-Baqarah ayat 228 sebagai dalil tidak memenuhi syarat, karena dukhul terhadap perempuan yang berzina tidak ada perceraian setelah terjadi *aqad* pernikahan. Padahal “*talaq* (perceraian) itu tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan terhadap perempuan yang merdeka”, ini yang dikatakan oleh Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi.¹²

Dari analisis metodologis inilah kemudian dalam bahasan di bawah nanti penulis akan memberikan deskripsi adanya konsekwensi-konsekwensi hukum *iddah* bagi perempuan yang berzina yang diqiyaskan dengan *iddah* perempuan talak nikah shahih yang tidak dapat, atau masih dipertanyakan untuk dibebankan pada perempuan tersebut.

¹² Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi, *Tafsir Gharaib al-Qur'an wa al-Righaib al-Furqan*, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Jilid I, 1996, hlm. 624

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANABILLAH TENTANG *IDDAH* WANITA HAMIL AKIBAT ZINA

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Pendapat Ulama' Hanabillah tentang *Iddah* Wanita Hamil Akibat Zina

Perzinaan telah dikenal manusia sepanjang sejarah kemasyarakatan dan sepanjang sejarah kebudayaan, perzinaan ini bukanlah suatu masalah individual, kesukuan, nasional atau internasional akan tetapi merupakan problem manusia yang tak akan pernah terselesaikan, oleh karena itu wajarlah bila Islam memberikan sangsi yang sangat berat terhadap pelanggarnya.

Mengenai hal wanita yang hamil akibat zina ini ulama' Hanabillah berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina itu wajib *iddah* yaitu sampai melahirkan.

Untuk memahami pendapat ulama' Hanabillah tentang kewajiban *iddah* terhadap perempuan yang berzina tanpa mengetahui metode ijtihadnya sangatlah tidak mungkin, karena bagaimanapun suatu pemikiran atau suatu pendapat muncul sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan lingkungan mujtahid tersebut. Jika difahami secara *Hermeunetik*, pendapat ulama' Hanabillah merupakan teks yang akan di analisis, maka sudah tentu ada sisi kontekstual yang mempengaruhi pendapat ulama' Hanabillah.

Mengenai ijtihad ulama' Hanabillah tentang keharusan *iddah* seorang perempuan yang berzina, ulama' Hanabillah menarik dasar dari al-Qur'an yaitu surat al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿49﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka kesenangan dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Q.S : al-Ahzab, 49)¹

Dan ayat perempuan-perempuan yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. ” (al-Baqarah: 228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿228﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali *quru'* . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S al-Baqarah: 228)².

Ulama' Hanabillah berpendapat bahwa al-Qur'an dan al- *Hadīs* adalah sumber dari sumber hukum. Al-Qur'an dan al- *Hadīs* ³ merupakan syari'at

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989, hlm. 675.

² Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 55.

³ Dalam posisi urutannya al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan al-Hadits yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam konsep wahyu Allah melalui malaikat Jibril yang

yang diturunkan oleh Allah di bumi ini. Dan Allah merupakan pemberi hukum (Syar'i)⁴

Dari dasar al-Qur'an tersebut bagi ulama' Hanabillah *iddah* itu berlaku karena adanya dukhul (percampuran), karena bagaimanapun seorang isteri yang sudah ada ikatan pernikahan dan ditalaq tidak berlaku *iddah* selama belum didukhul.

Analisis penulis terhadap ijtihad ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita yang berzina ada beberapa yang masih menjadi kritik. Memang benar bahwa *iddah* itu wajib karena adanya dukhul, para Imam mujtahid seperti Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah sepakat terhadap hal ini, karena perintah dalam nash jelas adanya. Tapi dalam peristiwa wanita yang berzina maka perintah dalam nash tidak ada yang mewajibkan *iddah*.

Bagi ulama' Hanabillah yang menjadi masalah dalam hal *iddah* yaitu bukan pada kehamilan yang menimbulkan nasab atau tidak tetapi pada persetubuhan yang bisa menyebabkan kehamilan, sebab adanya akad tidak bisa dijadikan sebagai pegangan terbukti wanita yang berakad bila ia diceraikan oleh suaminya sebelum digauli (*qobla dukhul*) maka ia tidak wajib *iddah*

Dengan demikian karena salah satu tujuan dari *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, bila seorang wanita berzina kemudian ia hamil maka ia wajib *iddah* karena sudah terbukti rahimnya tidak bersih, bahkan

makna dan lafadznya telah dikehendaki oleh Allah sedangkan al-Hadits merupakan wahy secara maknawi yang bahasanya merupakan bahasa Nabi.

⁴ Al-Qur'an al Karim, 6 : 57.

seandainya tidak bersihpun wanita yang berzina itu tetap wajib *iddah* yaitu dengan tiga kali haid karena ia sudah melakukan persetubuhan.⁵

Jadi kesimpulan dari pendapat ulama' Hanabillah dan ulama' yang mendukungnya yaitu tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina dikarenakan mereka mensyaratkan adanya *iddah* yaitu sampai melahirkan.

Pendapat ulama' Hanabillah ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'I, Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 53.

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam pasal (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir⁶.

Perbedaan pendapat ini menurut penulis disebabkan adanya perbedaan pemahaman diantara para ulama' mengenai *iddah*. Meskipun keduanya tentunya sama-sama memahami bahwa tujuan dari *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, namun bagi ulama' Syafi'i, Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam wanita hamil yang menjadi masalah

⁵ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani 2002, hlm30.

⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm 125.

bukan pada kehamilan itu sendiri tapi pada apakah kehamilan itu menimbulkan nasab atau tidak dengan laki-laki yang menghamilinya. Bila menimbulkan nasab maka ia wajib *iddah* tetapi bila tidak menimbulkan nasab ia tidak wajib *iddah*. Sementara itu hubungan nasab hanya ada bila terjadi akad nikah artinya wanita yang hamil dan anak yang ada dalam kandungannya itu ada yang memiliki yaitu suaminya, wanita yang hamil akibat zina jelas bahwa wanita itu dan anak yang ada dalam kandungannya tidak ada laki-laki yang memilikinya karena tidak ada akad. Dengan demikian wanita yang hamil akibat zina tidak wajib *iddah* karena tidak ada akad.

ulama' Hanabillah tidak secara jelas metode apa yang digunakan olehnya untuk memahami ayat-ayat tentang *Iddah* sehingga menarik kesimpulan wajibnya *iddah* terhadap perempuan yang berzina. Menurut analisis penulis ulama' Hanabillah cara istinbathnya lebih dekat menggunakan metode *istinbath qiyas*,⁷ yaitu sebuah metode *istinbath* dengan jalan menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara kedua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya) hukumnya.⁸

Menurut penulis hukum *iddah* wanita yang berzina jika dikorelasikan dengan rukun-rukun *qiyas*, maka penjelasannya sebagai berikut:

⁷ Al-Imam Muwafiq al-Din Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudloh al-Naadzir wajunnah*, Beirut, Daar al-Kitab al-Imamiyah, hlm. 166.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm. Ushul al-Fiqh*, terj. KH. Masdar Helmy, Gema Risalah Press, 1996, hlm. 93

1. Asal.

Ulama' Hanabillah mengambil dua dalil dalam al-Qur'an, yaitu bahwa *iddah* merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik cerai mati atau *talaq* (ulama' Hanabillah mempersamakan *iddah* orang yang berzina dengan wanita yang ditalaq). Tapi yang lebih ditegaskan lagi bahwa *iddah* itu diwajibkan pada wanita yang telah didukhul (disetubuhi) dan tidak berlaku bagi wanita yang belum didukhul. Ini disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿228﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S al-Baqarah: 228)

Jumhur ulama sepakat bahwa makna lafadz *tamassu* adalah *dukhul*, ulama' Hanabillah juga menggunakan makna ini. Dan mengenai batas waktu pelaksanaan *iddah* telah disebutkan, yaitu selama tiga *quru'* bagi perempuan yang punya haid. Ini disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat

228. Dan sampai melahirkan bila ia dalam keadaan hamil, serta selama tiga bulan bagi perempuan yang tidak punya masa haid, ini disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 4.

2. Far'un (cabang)

Cabang di sini adalah bagaimana *iddah* wanita yang berzina.

3. Illat

Sebab diwajibkannya *iddah* seperti yang diambil dari mafhum mukhalafah al-Quran surat al-Ahzab ayat 49 karena adanya pecampuran (persetubuhan), karena persetubuhan inilah *iddah* menjadi hal yang urgen yaitu untuk mengetahui kondisi rahim. Dan mengenai batas waktu pelaksanaan *iddah* telah disebutkan, yaitu selama tiga *quru'* bagi perempuan yang punya haid. Ini disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228. Dan sampai melahirkan bila ia dalam keadaan hamil, serta selama tiga bulan bagi perempuan yang tidak punya masa haid, ini disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 4.

Dan persetubuhan ini juga telah terjadi pada wanita yang berzina, yang tidak disebut dalam al-Quran. Karena al-Qur'an hanya menyebut perpisahan karena *talaq* (jelas ini karena adanya pernikahan), dan meninggal dunia.

4. Hukum

Hukum asal (yang disebut al-Qur'an) bahwa orang yang berpisah dari suaminya karena *talaq* harus menjalani *iddah*, dengan ketentuan ia telah didukhul (disetubuhi) oleh suaminya. Seperti yang

telah disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49. Dan mengenai batasan waktu *iddah* adalah tiga *quru'* seperti yang disebut dalam surat al-Baqarah ayat 228, atau sampai melahirkan bagi perempuan yang mengandung, seperti yang disebut dalam surat al-Thalaq ayat 4.

Bagaimana dengan perempuan yang berzina? Jelas berlaku sama, karena bagi wanita yang berzina sama-sama telah *didhukul* (disetubuhi) oleh laki-laki wajib ia beriddah, sebagaimana disebut dalam surat al-Ahzab ayat 49 karena adanya percampuran (persetubuhan).

Karena persetubuhan inilah *iddah* menjadi hal yang urgen yaitu untuk mengetahui kondisi rahim. Dan persetubuhan ini juga telah terjadi pada wanita yang berzina.

Dari *illat* itulah ulama' Hanabillah menarik kesimpulan hukum bahwa siapa saja bagi wanita yang sudah didukhul wajib baginya beriddah, baik karena persetubuhan nikah sah, persetubuhan *syubhat*, perzinahan dan pemerkosaan sekalipun.

Mengenai persamaan hukum antara *iddah* orang yang berzina dengan *iddah* orang yang ditalaq suaminya ini terdapat dalam salah satu ungkapan ulama' Hanabillah:

ولنا انه وطء يقتضي الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة وأما وجوبها كعدة المطلقة⁹

Artinya: “Adapun masa *iddah* bagi perempuan yang berzina untuk menetapkan kondisi rahim, kewajiban *iddahnya* sama

⁹ Al-Imam Muwafiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 78-79

dengan perempuan yang diwathi secara syubhat, dan sama juga dengan perempuan yang ditalak”.

Pendapat ulama’ Hanabillah bahwa *iddah* untuk mengetahui kondisi rahim memang berbeda dengan ulama lainnya, seperti dengan ulama Syafi’iyah yang mengatakan *iddah* berfungsi memelihara nasab, sedang perempuan zina tidak menimbulkan hubungan nasab. Ini merupakan konsekwensi dari pendapatnya bahwa nikah bagi ulama Syafi’iyah adalah aqad, dan aqad ini yang menimbulkan hubungan nasab keluarga.

Beda dengan ulama’ Hanabillah, nikah menurut ulama’ Hanabillah secara hakiki adalah aqad dan *wathi* (persetubuhan), tanpa memisahkannya. Tapi dalam analisis penulis pendapat ulama’ Hanabillah tidak ada korelasinya dari definisinya tentang nikah. Karena status anak zina tetap tidak mempunyai hak-hak seperti anak nikah shahih yang berhubungan dengan nasab ayahnya.

Mengenai batas tenggang masa *iddah*. ulama’ Hanabillah mendasarkan hukumnya pada surat al-Baqarah ayat 228 yaitu tiga *quru’*

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿228﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali *quru’* . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya

menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah ayat 228)¹⁰

Bagi wanita yang mempunyai masa haid ulama' Hanabillah mendasarkan pada dan surat al-Thalaq ayat 4.

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق: 4﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka Iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-Thalaq: 4)¹¹

Iddah wanita yang berzina diqiyyaskan hanya dengan wanita yang dithalaq. Ini dapat dimengerti dari ungkapannya bahwa *iddah* bagi wanita yang berzina sama dengan *iddah* bagi wanita yang ditalaq karena nikah shahih. Beliau tidak mengqiyyaskan dengan wanita yang berpisah dari suaminya karena meninggal.

Tapi yang menjadi kritik dari penyandaran hukum yang digunakan ulama' Hanabillah bahwa kalimat *talaq* dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang disingung oleh Allah adalah terjadi karena adanya *aqad* pernikahan, maka penarikan surat al-Baqarah ayat 228 sebagai dalil tidak memenuhi syarat, karena *dukhul* terhadap perempuan yang berzina tidak ada perceraian

¹⁰ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 55.

¹¹ *Ibid*, hlm. 946.

setelah terjadi aqad pernikahan. Padahal “*talaq* (perceraian) itu tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan terhadap perempuan yang merdeka”, ini yang dikatakan oleh Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi.¹²

Dari analisis metodologis inilah kemudian dalam bahasan di bawah nanti penulis akan memberikan deskripsi adanya konsekwensi-konsekwensi hukum *iddah* bagi perempuan yang berzina yang diqiyaskan dengan *iddah* perempuan *talaq* nikah shahih yang tidak dapat, atau masih dipertanyakan untuk dibebankan pada perempuan tersebut.

B. Analisis Terhadap *Istinbat* Hukum Ulama’ Hanabillah Tentang *iddah* Wanita Hamil Akibat Zina

Diatas telah dijelaskan *iddah* menurut ulama’ Hanabillah. Terjadinya *iddah* disebabkan karena adanya persetubuhan, ini dapat dipahami dari ungkapannya “tidak ada *iddah* orang yang berpisah dari suaminya sebelum terjadi persetubuhan”. Pendapat ulama’ Hanabillah ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
﴿الأحزاب: 49﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu

¹² Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi, *Tafsir Gharaib al-Qur'an wa al-Righaib al-Furqan*, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Jilid I, 1996, hlm. 624

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (QS al-Ahzab : 49)¹³

Apabila seorang perempuan sudah melakukan pesetubuhan dengan seorang laki-laki, baik dari pernikahan yang sah maupun yang fasid, karena *wathi syubhat*, *wathi* diluar nikah (tanpa adanya akad), dan karena pemerkosaan, maka ia terkena kewajiban untuk *iddah*.

Dari landasan berfikir itulah kemudian mempengaruhi ulama' Hanabillah tentang *iddah* bagi wanita yang berzina. Menurut wanita yang berzina wajib baginya *iddah*, mengapa ?. Jelas wanita yang berzina telah melakukan persetubuhan, dan menurutnya salah satu fungsi *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahimnya.

Pendapat tersebut seperti halnya yang dikatakan Wahbah Zuhaili bahwa *iddah* disyariatkan dengan alasan utama untuk mengetahui kondisi rahim perempuan yang bercerai dari suaminya, karena ketegasan kenisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal penting. Sehingga untuk menghindari kekacauan nisbat keturuna dilakukan aturan *iddah* bagi istri yang bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup atau mati¹⁴.

Pendapat lain juga mengatakan ketika perempuan disetubuhi dengan cara *syubhat* (tidak ada kejelasan) maka tetap baginya masa *iddah*, karena

¹³ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 675.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, juz VII, 1996, hlm

iddah itu wajib dalam rangka membersihkan rahim dan menjaga dari percampuran sperma dan ketidakjelasan nasab¹⁵

Dari ayat al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang dijadikan dasar pendapat ulama' Hanabillah tentang keharusan *iddah* bagi wanita hamil akibat zina, Menurut penulis ayat diatas menerangkan tentang sebab *iddah* yaitu setelah di dukhul karena akad pernikahan yang sah. Akan tetapi jika dikaitkan dengan wanita yang hamil akibat zina jelas bukan melalui akad yang sah sehingga menurut penulis tidak ada *iddah* bagi wanita hamil akibat zina. Hal ini sependapat dengan Tafsir Gharaib al-Qur'an Wa al-Righaib al-Furqan yang dikarang oleh Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi yaitu "Kalimat *talaq* dalam surat al-Ahzab yang menyebabkan *iddah* adalah terjadi karena adanya aqad pernikahan, *dukhul* terhadap perempuan yang berzina tidak ada perceraian setelah terjadi aqad pernikahan. Padahal "*talaq* (perceraian) itu tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan terhadap perempuan yang merdeka".¹⁶

Kewajiban *iddah* bagi wanita yang ditalaq setelah dukhul. terjadi karena adanya *akad*. Sehingga wanita yang hamil akibat zina tidak diwajibkan baginya untuk *beriddah*. Yang menjadi masalah dalam hal wanita hamil akibat zina bukan pada kehamilan itu sendiri tapi apakah kehamilan itu menimbulkan nasab atau tidak, bila menimbulkan hubungan nasab maka ia wajib *iddah*, tapi bila tidak menimbulkan hubungan nasab maka ia tidak wajib *iddah*. Sementara itu hubungan nasab hanya ada bila terjadi akad nikah.

¹⁵ Syaikh Islam Abi Muhammad Muaffaqadin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqih Imam Ahmad bin Hambal*, Juz III, Beirut: Darul Fikr, tt, hlm. 213.

¹⁶ Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi, *op.cit*, hlm. 624.

Pendapat ulama' Hanabillah diatas sama dengan pendapat para ulama Malikiyah. Dan sangat berbeda dengan pendapat para ulama Syafi'iiyah dan Hanafiyah, menurut dua golongan ini wanita yang berzina tidak wajib baginya beriddah. Alasan yang digunakan bahwa *iddah* itu berfungsi untuk menjaga nasab, sedangkan zina dalam pandangan mereka tidak akan menimbulkan hubungan nasab.

Tapi pendapat para ulama Syafiiyah dan Hanafiyah ini ditolak oleh ulama' Hanabillah. Semestinya jika *iddah* diwajibkan dengan maksud menjaga terpeliharanya nasab, maka wanita yang zina juga wajib atasnya *iddah*, tanpa adanya *iddah* akan terjadi kekacaun nasab.¹⁷

Ulama' Hanabillah dalam berpendapat tentang wajibnya *iddah* bagi wanita berzina didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 228, Ayat ini dipahami secara umum, dimana setiap perempuan yang berpisah dengan pasangannya dan telah melakukan persetubuhan, baik dalam nikah yang shahih, nikah fasid, karena *wathi syubhat* ataupun karena perzinaan, dan perempuan tersebut masih mempunyai *quru'*, maka ia harus menjalani masa *iddah* selama tiga *quru'*.

Kejadian yang sering terjadi dimasyarakat, wanita yang melakukan persetubuhan diluar nikah akan meneruskan sampai kejenjang pernikahan tanpa adanya *iddah*. Bahkan jika terjadi kehamilan status anak dalam

¹⁷ Al-Imam Muwafiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, *op.cit.*, hlm 79

kenasabannya akan dihubungkan pada laki-laki yang menikahi wanita tersebut.¹⁸

Tapi apa yang difatwakan Imam Hanbali alasan diwajibkannya *iddah* bagi wanita yang berzina karena telah terjadi persetubuhan maka *iddah* untuk mengetahui kondisi rahim akan menjadi hal yang kontroversial, banyak hal yang masih dipertanyakan dari fatwa itu secara argumentatif.

1. Pertama dengan keberadaan zaman sekarang yang teknologi serba mutakhir, dimana kondisi rahim seseorang dapat diidentifikasi apakah terjadi pembuahan atau tidak.. Dari sini akan timbul pertanyaan, bagaimana jika dengan teknologi yang canggih ini ternyata kondisi rahim dapat diidentifikasi tidak terjadi pembuahan janin, apakah harus menunggu masa *iddah* atau tidak .
2. Kedua jika perempuan yang berzina tersebut mengandung dan telah diketahui secara pasti janinnya adalah hasil pembuahan dengan orang yang menzinai, tapi pria yang menzinai ataupun orang lain bersedia menikahnya, dengan konsekwensi *Syar'i* status anak tetap bernasab pada ibunya, masiakah wanita tersebut dibebani *iddah*.

Para fuqoha' sering menggunakan dalil teologis *lita'abbudi* (sebagai amal ibadah).¹⁹ Jika menemui sebuah permasalahan yang secara rasionalitas dapat dipatahkan argumentasinya. Mereka beralasan bahwa *iddah* merupakan

¹⁸ Ini hanya sekedar sample, dalam hal ini penulis tidak akan membahas tentang keabsahan status anak yang hamil diluar nikah, karena jelas bukan bahasan skripsi ini.

¹⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz I, hlm. 55.

perintah Allah SWT yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, sehingga perintah-perintah itu harus dijalankan bagi orang yang mampu atau terkena beban untuk menjalankannya (*mukallaf*), yaitu perempuan yang bercerai dengan suaminya. Bentuk serta perbuatan untuk menjalankan perintah Allah inilah yang disebut dengan ibadah.

Menurut Imam Syafi'i sebagai salah satu ulama' yang tidak mewajibkan wanita yang berzina beriddah, berpendapat bahwa wanita tersebut boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya atau orang lain, bahkan boleh menyetubuhinya. Sedang menurut Hanafiyah wanita yang berzina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya atau orang lain, tapi tidak boleh menyetubuhinya sampai waktu melahirkan.²⁰ Jika dilihat dari aspek masalahnya penulis tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama' Hanabillah yang mengatakan bahwa *iddah* wajib bagi wanita yang hamil akibat zina. Yang menjadi masalah dalam hal *iddah* wanita yang hamil akibat zina bukan pada kehamilan itu sendiri, tapi apakah kehamilan itu menimbulkan nasab atau tidak dengan pria yang menghamilinya. Bila menimbulkan nasab maka wajib *iddah* tapi bila tidak menimbulkan nasab maka tidak wajib *iddah*, sementara itu hubungan nasab hanya ada bila terjadi akad nikah, artinya wanita yang hamil dan anaknya yang ada dalam kandungannya itu ada yang memiliki yaitu suaminya. Dalam hal wanita yang hamil akibat zina jelas bahwa wanita itu dan juga. anak yang ada dalam kandungannya tidak ada laki-laki yang memilikinya karena tidak ada akad.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, Beirut, Dar al-Ilm li al-Malayin, cet.I, 1964, hlm. 152-153

Hukum yang termuat dalam KHI juga lebih banyak menganut paham Syafi'iyah, ini terlihat dalam ungkapan asalnya yang menghalalkan perkawinan bagi orang yang hamil diluar nikah (wanita berzina), tanpa ketentuan adanya *iddah*, dengan catatan yang mengawini adalah pria yang menghamilinya. Ini termuat dalam pasal 53:

- 1) Seorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak peril dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Bahkan yang lebih *ironis* apa yang terjadi dalam aplikasi hukum, karena kehamilan wanita diluar nikah tidak diuji secara medis, catatan sipil sering mencatat sebuah perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hanya berdasarkan pengakuan.

Hamil diluar nikah bagi masyarakat adalah aib yang harus disembunyikan, kadang seorang wanita tidak mengakui perbuatan zina dengan laki-laki selain calon suaminya. Hal ini berdampak pada permainan hukum.

Karena itulah penulis lebih cenderung dengan pendapat yang tidak mewajibkan adanya *iddah* bagi wanita yang hamil akibat zina, karena aturan-aturan yang berkaitan dengan *iddah* secara umum mengisyaratkan yang pertama yaitu dengan adanya kepemilikan terhadap wanita itu oleh laki-laki

tertentu, baik kepemilikan melalui akad, pembelian maupun hasil tawanan perang. Tanpa kepemilikan maka tidak ada *iddah*. Yang kedua karena anak yang dikandung mengikuti nasab ibu. Yang ketiga untuk menjaga harga diri wanita yang hamil akibat zina tersebut karena hamil di luar nikah merupakan aib di masyarakat. Yang keempat *iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian didalam bab-bab sesudahnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pendapat ulama' Hanabillah tentang *iddah* wanita hamil akibat zina adalah dilatar belakangi oleh masalah dalam hal *iddah* itu bukan pada kehamilan yang menimbulkan nasab melainkan pada persetubuhan yang bisa menyebabkan kehamilan, sebab adanya akad tidak bisa dijadikan sebagai pegangan terbukti wanita yang berakad bila ia diceraikan oleh suaminya sebelum disetubuhi maka ia tidak wajib *iddah*, artinya persetubuhan itulah yang menjadi dasar ada atau tidak adanya *iddah*.
2. Jika difahami pendapat ulama' Hanabillah terjadinya suatu *iddah* adalah karena persetubuhan. Bagi wanita yang berzina menurut ulama' Hanabillah wajib baginya beriddah. Pendapat ini didasarkan pada fungsi *iddah* bagi seorang perempuan, salah satu fungsi *iddah* untuk mengetahui kondisi rahim. Berlakunya *iddah* kerana adanya dukhul seperti yang dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 49. Jelas juga berlaku sama bagi wanita yang berzina Bagaimanapun juga perempuan yang berzina itu sudah didukhul, yang berarti rahimnya sudah pernah diisi oleh laki-laki yang menzinainya.

B. Saran-saran

1. Alangkah lebih baik jika *iddah* bagi perempuan yang berzina dihukum positifkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini untuk menutup kran manipulasi hukum orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini selama tidak dapat diidentifikasi dengan siapa wanita itu berzina dan bagaimana kondisi rahimnya.
2. Hasil apapun yang diperoleh dari penelitian para ulama, para yuris atau cendekiawan Islam harus bersikap toleran dan tidak menganggap bahwa pendapatnyalah yang paling benar, hendaknya senantiasa menyesuaikan dengan semangat ikhtilaf untuk menghasilkan ijtihad baru yang merupakan tujuan dari syari'at Islam itu sendiri.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah, Rabbul 'alamin, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada Muhammad saw. seorang reformis sejati, yang selalu menjadi panutan dan tuntunan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan, sehingga masih jauh dari kesempurnaan, meskipun segala usaha dan kemampuan telah penulis curahkan. Selanjutnya penulis mengharapkan bimbingan, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhirnya, ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak

terhingga kepada para pihak yang telah sudi membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri penulis dan pembaca semua. Hanya kepada Allah SWT-lah penulis selalu mengharapkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya. Amin, Ya Rabb Al ‘Alamin. *Wa Allahu A’lamu Bi ash-Showab.*

DAFTAR PUSTAKA.

Lynn Wilcox, *Women and The Holy Qur'an*, terj. DICTIA “*Wanita dan al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*”, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, cet. I, hlm. 132.

IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, 1985, cet. ke-2, hlm. 274.

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 176.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1, Cet. ke-6, 2003, hlm.112.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi1, Cet. ke-11, 1998, hlm. 66.

M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, cet. ke-2, hlm. 448-449

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004, hlm.6.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 114

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 106

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 37.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, hlm. 274.

Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikaah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 24.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, cet. I, 1999, hlm. 637.

Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khattab RA.*, Terj. M. Abdul Mujieb AS (et.al), *Ensiklopedi Fiqih umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. I, 1999, hlm. 160.

Abdul Fatah Idris, Abu Uhmadi, *Kifayatul Akhyar, Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, tth, hlm. 246.

Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet ke-III, 2006, hlm. 70-71

Mustofa Diibulbigha, *Fiqih Syafi 'I*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, hlm. 409.

Hady Mufaat, *Fikih Munakahat* (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya), Duta Grafika, 1992, hlm. 229..

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawina Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1403 H, hlm 143.

T.M Hasbi ash-Syieddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 518..

Moenawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafy, Maliki, Syafi 'I, Hambali, Jakarta: Bulan Bintang 1955, Hlm. 254.

Sobhi Mahmassani, *Filasafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, tth, hlm. 72

Ma'mun Efendi Nur, *Konsep Fiqh Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Surabaya: Bintang Pelajar, 2006, hlm. 13.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 329.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 hlm : 230-231.

Nidho al-Din bin Muhammad Husain al-Qummy al-Naisanburi, *Tafsir Gharaib al-Qur'an wa al-Righaib al-Furqan*, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Jilid I, 1996, hlm. 624

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, juz VII, 1996, hlm 627

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz I, hlm. 55.

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut, Dar al-Ilm li al-Malayin, cet.I, 1964, hlm. 152-153

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Zainudin.
Tempat tanggal lahir : Kendal, 15 Februari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Dukuh Cabean RT 09 RW 05 Desa Kedung
Gading Kecamatan Ringin Arum Kabupaten Kendal
51356.


Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Ringin Arum Kecamatan Gemuh (1990-1996).
2. SMP NU 10 Ringin Arum Kecamatan Gemuh(1996-1999).
3. SMU Futuhiyyah Mranggen Demak (1999-2002).
4. Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2008

Ahmad Zainudin
2103214

 **DEPARTEMEN AGAMA RI**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngalian Boja Km.02 Semarang telp/Fax (024)601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesaikan bimbingan skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zainudin
NIM : 2103214
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TEHADAP PENDAPAT ULAMA'
HANABILLAH TENTANG IDDAH WANITA HAMIL
AKIBAT ZINA.

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses Pembimbingan :.....
2. Kemampuan penulisan
(Metodologi dan Materi) :.....
- Nilai Rata-Rata*)** :.....

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2008

Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Mijibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG

Jl. Raya Ngalian Boja Km.02 Semarang telp/Fax (024)601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesaikan bimbingan skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zainudin

NIM : 2103214

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TEHADAP PENDAPAT IMAM HANBALI
TENTANG IDDAH WANITA HAMIL AKIBAT ZINA.

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Proses Pembimbingan | :..... |
| 2. Ksemampuan penulisan | |
| (Metodologi dan Materi) | :..... |
| Nilai Rata-Rata*) | :..... |

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2008

Pembimbing II,

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611